

PERAN KOMUNIKASI MEDIA DAN EKONOMI TERHADAP POLITIK DI INDONESIA

Detya Wiryany¹⁾, Wawan Darmawan²⁾

Fakultas Komunikasi dan Desain Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

Email: detyawiryany@unibi.ac.id¹, wawandarmawan@gmail.com²

Abstrak

Indonesia merupakan Negara yang mengusung pemahaman politik demokrasi dimana masyarakat sebagai penentu keseluruhan kebijakan. Indonesia melewati berbagai jenis demokrasi diawali demokrasi terpimpin hingga demokrasi Pancasila sampai saat ini. Dalam perkembangan politiknya tidak terlepas dari peran Komunikasi Media dan Ekonomi yang menggeser tipe-tipe demokrasi yang diusung. Komunikasi Media yang terus berkembang berperan penting dalam arah kebijakan politik di Indonesia. Selain itu keadaan Ekonomi Negara menjadi faktor utama lain yang juga dapat menggeser sistem demokrasi yang digunakan di Indonesia. Penulis melihat peranan komunikasi media yang cukup signifikan dalam perubahan sistem Politik sehingga akhirnya Indonesia bertahan pada sistem demokrasi Pancasila.

Kata Kunci: Komunikasi Media, Ekonomi, Sistem Politik, Demokrasi

Abstract

Indonesia is a country that carries the understanding of democratic politics in which society determines overall policy. Indonesia passed various types of democracy beginning with guided democracy to Pancasila democracy to date. In its political development it is inseparable from the role of Media and Economic Communication which shifts the types of democracy carried out. Media communication that continues to grow plays an important role in the direction of political policy in Indonesia. In addition, the state of the State Economy is another major factor that can also shift the democratic system used in Indonesia. The author sees the role of media communication which is quite significant in changing political systems so that Indonesia finally survives in the Pancasila democratic system.

Keywords: Media Communication, Economy, Political System, Democracy

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan paham demokrasi yang paling kuat di dunia. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *checks and balances*.

Semenjak kemerdekaan 17 Agustus 1945, UUD 1945 memberikan penggambaran bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Dalam mekanisme kepemimpinannya Presiden harus bertanggung jawab kepada MPR dimana MPR adalah sebuah badan yang dipilih dari Rakyat. Sehingga secara hirarki seharusnya rakyat adalah pemegang kepemimpinan negara melalui mekanisme perwakilan yang dipilih dalam pemilu. Indonesia sempat mengalami masa demokrasi singkat pada tahun 1956 ketika untuk pertama kalinya diselenggarakan pemilu bebas di Indonesia, sampai kemudian Presiden Soekarno menyatakan demokrasi terpimpin sebagai pilihan sistem pemerintahan. Setelah mengalami masa Demokrasi Pancasila.

Dipandang dari sudut perkembangan demokrasi sejarah Indonesia dapat dibagi dalam tiga masa yaitu :

1. Masa republik Indonesia I, yaitu masa demokrasi yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai dan yang karena itu dapat dinamakan demokrasi parlementer.
2. Masa republik Indonesia II, yaitu masa Demokrasi Terpimpin yang dalam banyak aspek telah menimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formil

merupakan landasannya, dan menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat.

3. Masa Republik Indonesia III, yaitu masa demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi yang menonjolkan sistem Presidensial.

2. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan studi kualitatif deskriptif dengan melakukan kajian literature buku dan informasi dari sumber lain.

3. PEMBAHASAN

Demokrasi di Indonesia mengalami transisi yang sangat berbeda antara era sebelum reformasi dengan era sesudah reformasi. Demokrasi sebelum reformasi dapat dilihat pada masa orde baru. Demokrasi pada masa orde baru belum mutlak terjadi di Indonesia, dimana pada masa orde baru demokrasi yang seharusnya menjadi hak rakyat masih dibatasi oleh besarnya kekuasaan dari pemerintah. Pada masa orde baru, angkatan-angkatan bersenjata di Indonesia masih menjadi penghalang besar bagi rakyat dalam mewujudkan demokrasi yang salah satu perwujudannya dapat dilakukan dalam hal hak untuk kebebasan menyampaikan pendapat.

Sejak pemerintahan Soeharto berakhir di tahun 1998, turut berubah pula paradigma hubungan sipil-militer di negeri ini. Negeri kita sebelumnya amat didominasi oleh militer, dan memang hal ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah bangsa Indonesia itu sendiri.

Setelah reformasi bergulir, saluran demokrasi dan prasyarat Indonesia menjadi negara demokratis terbuka lebar.

Kebebasan berpendapat secara lisan atau tulisan, baik melalui media cetak maupun media elektronik mengalami kemajuan yang sangat pesat. Namun, terkadang ada yang menyalah artikan kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut. Dengan mengartikan semua hal boleh diungkap walaupun melanggar etika, moralitas, dan hukum.

Kemudian muncullah internet dan sosial media yang begitu digandrungi sampai saat ini. Sosial media membuat masyarakat memiliki tempat untuk menyampaikan pendapat secara gamblang dan sesuai dengan keinginan masing-masing individu. Hal ini yang memicu berbagai kontroversi karena ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi teknologi baru tersebut. Masyarakat Indonesia seakan “kebablasan” mengartikan suatu kebebasan dalam pendapat. Ini sangat terasa pada saat pemilihan presiden dan wakil presiden di tahun 2014. Alih-alih menyampaikan pendapat, masyarakat tergiring kepada statmen-statmen penghinaan demi memojokan pesaing mereka dalam pemilihan tersebut.

Perkembangan yang terjadi pada demokrasi begitu kompleks di Indonesia ini. Namun penulis melihat demokrasi dimanfaatkan oleh penguasa-penguasa politik untuk bisa terus berkuasa di negeri ini. Penguasa politik di Indonesia menfokuskan diri kepada 2 aspek penting dalam berkuasa yaitu komunikasi dan ekonomi. Perkembangan dalam dunia politik saat ini tidak terfokus kepada kekuatan militer kembali namun sudah bergeser kepada kekuatan komunikasi dan ekonomi.

Kita bisa memulai kajian perkembangan politik di Indonesia meninjau dari segi Ekonomi. Uang merupakan salah satu kekuatan besar dalam politik di Indonesia saat ini. Jika kita melihat kebelakang dimana pemimpin daerah, anggota DPR bahkan Presiden lebih banyak diisi oleh kalangan-kalangan dari militer. Hal ini lebih banyak terjadi pada saat masa kekuasaan almarhum Presiden

Soeharto. Seiring bergesernya nilai demokrasi yang kita anut, maka pos-pos yang dahulu lebih mayoritas dari kalangan militer saat ini banyak diisi oleh kalangan yang mempunyai kemampuan ekonomi yang kuat. Pengusaha, artis dan orang-orang yang mempunyai kuasa dalam uang saat ini lebih dominan memasuki pos-pos politik dan pemerintahan.

Kekuasaan uang inilah yang menimbulkan beberapa polemik baru dalam tataran politik Indonesia saat ini. Indonesia terkenal dengan negara yang demokratis dengan adanya pemilihan umum dalam memilih baik pimpinan daerah, presiden, anggota legislatif dan lainnya melalui pemilihan langsung oleh masyarakat. Ini menuntut calon-calon yang akan mengisi pos tersebut mempunyai elektabilitas dan juga pamor yang kuat dimasyarakat agar dapat terpilih. Untuk mencapai hal tersebut maka diperlukan usaha yang gencar dalam menaikkan elektabilitas dan pamor seseorang calon tersebut. Banyak hal yang digunakan, bisa beriklan di televisi, membuat spanduk, baliho dan pamflet dan dibagikan keseluruh pelosok ataupun dengan memberikan santunan-santunan langsung kepada masyarakat. Kegiatan yang termasuk dalam promosi tersebut membutuhkan dana yang cukup besar dalam proses pelaksanaannya.

Penulis ambil contoh salah satu kabupaten di Bengkulu yaitu Kabupaten Kepahiang. Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang NOMOR : 32/Kpts/KPU-Kab-007.434311/2015 Tentang pembatasan biaya kampanye pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang tahun 2015 disebutkan di dalamnya rincian berikut:



Gambar 1 Pembatasan Biaya Pemilu

Jika melihat data tersebut bisa kita bayangkan, untuk daerah pemilihan kapahiang saja memerlukan dana lebih dari 2 milyar rupiah. Bagaimana dengan daerah-daerah lain yang merupakan daerah perkotaan dan bagaimana juga besaran biaya yang dikeluarkan para calon anggota DPR dan Presiden yang pemilihnya merupakan seluruh rakyat Indonesia. Tentu merupakan jumlah yang sangat besar. Hal inilah yang kemudian menuntun bakal calon harus mempunyai modal yang cukup besar ketika akan mencalonkan diri. Saat ini orang-orang yang mempunyai dana besar untuk dapat mengikuti pemilihan di Indonesia adalah kalangan pengusaha, artis tokoh-tokoh masyarakat yang sudah cukup lama berkecimpung didunia politik.

Seperti inilah gambaran politik negeri Indonesia saat ini. Dimana militer bukan sebagai raja lagi di dunia politik saat ini namun sudah masuk kepada ranah kekuasaan ekonomi. Siapa yang dapat menghasilkan uang sebanyak-banyaknya maka dia punya peluang besar juga untuk mengisi pos-pos politik di negeri ini. Terkadang kita banyak yang berfikir politik yang dapat mempengaruhi ekonomi suatu negara, namun penulis lebih melihat di Indonesia khususnya, ekonomi negara inilah yang mendorong negara ini mengambil hirarki politik seperti saat ini.

Dalam buku Herman Soewardi dibahas tentang islamisasi sains yang menjabarkan tentang Naqliyah memandu Aqliyah. Dengan wujud konkrit berupa alih

premis, dari premis empirikal (value Barat yang salah), ke premis transcendental (value Tuhan yang benar), di segala bidang ilmu (Psikologi, Sosial, Ekonomi, Sains Empirikal Kealaman, dan Sains Formal) yang disebut pula disebut pula secara Bayani, atau Tekstual. Islamisasi juga mungkin harus diterapkan dalam berpolitik di Indonesia ini, karena saat ini akibat dari fokus utama negara adalah kekuatan ekonomi sehingga agak mengesampingkan kekuatan agama yang merupakan identitas awal negara ini.

Selain Ekonomi, hal yang sangat mempengaruhi dunia politik di Indonesia adalah Komunikasi. Menurut Deddy Mulyana dalam bukunya Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar (2004, 41) Komunikasi adalah suatu kebutuhan pokok bagi setiap manusia. Fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial dapat mengisyaratkan bahwa komunikasi itu sangat penting untuk membangun konsep dalam diri, untuk mengaktualisasikan diri, untuk kelangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, dan terhindar dari ketegangan dan tekanan antara lain dengan melalui komunikasi yang menghibur, dan juga untuk memupuk hubungan luas dengan orang lain.

Kata komunikasi atau *communication* menurut Deddy Mulyana dalam bukunya Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar (2004, 41) dalam bahasa Inggris berasal dari kata Latin *communis* yang berarti "sama", *communico*, *communicatio*, atau *communicare* yang berarti "membuat sama" (to make common). Istilah yang paling sering disebut sebagai asal-usul kata komunikasi, yang merupakan akar dari kata-kata Latin lainnya yang mirip. Komunikasi menyarankan bahwa suatu pikiran, suatu makna, atau suatu pesan dianut secara sama.

Alo Liliweri dalam bukunya Wacana Komunikasi Organisasi (2004: 53) memaparkan bahwa komunikasi dalam penerapannya pada setiap kegiatan memiliki fungsi yang beraneka ragam, dan berikut fungsi komunikasi tersebut:

a. Fungsi Pribadi:

Adalah fungsi-fungsi komunikasi yang ditunjukkan melalui perilaku komunikasi yang bersumber dari seorang individu, terdiri dari:

- 1) Menyatakan identitas sosial
- 2) Menyatakan integrasi sosial
- 3) Menambah pengetahuan
- 4) Melepaskan diri/jalan keluar

b. Fungsi Sosial

- 1) Pengawasan; Praktek komunikasi diantara komunikator dan komunikan yang berbeda berfungsi untuk saling mengawasi.
- 2) Menjembatani; Komunikasi merupakan jembatan untuk menghubungkan dua orang yang berbeda. Fungsi menjembatani itu dapat terkontrol melalui pesan-pesan yang mereka pertukarkan, keduanya saling menjelaskan perbedaan tafsir atas sebuah pesan sehingga menghasilkan makna yang sama.

Dari beberapa pembahasan tentang komunikasi diatas, bisa kita lihat pula fungsi komunikasi yang sedikitnya dimanfaatkan oleh dunia politik saat ini di Indonesia. Poin 1 dan 2 pada fungsi individu memperlihatkan kepada kita mengapa begitu banyaknya perang iklan untuk mempromosikan seseorang yang sedang melakukan kampanye dalam proses pemilihan umum. Kebutuhan akan pengakuan oleh masyarakat atas identitas sosial dan integritas sosial seorang calon kepala daerah atau calon anggota legislatif di setting sedemikian rupa melalui iklan-iklan dan kegiatan-kegiatan promosi lainnya. Saat belum memasuki dunia komunikasi tanpa media sosial di internet, iklan televisi, radio, baliho serta pamflet menjadi primadona bagi bakal calon namun seiring dengan berkembang pesatnya internet yang khususnya sosial media, gaya kampanye saat ini banyak menasar sosial media seperti facebook, twitter, path, instagram dan lainnya.

Sisi positif dari berkembangnya kampanye melalui media sosial adalah

biaya yang digunakan lebih sedikit dibandingkan kampanye konvensional. Namun sayangnya di Indonesia hal negatif dalam kampanye di sosial media adalah pola komunikasi menjadi gerbang cacian dan perperangan kata-kata antar pendukung yang sulit sekali dibendung.

Puncak dari dampak negatif dari kampanye di sosial media dapat kita lihat pada saat kampanye pemilihan presiden tahun 2014 yang mempertarungkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Bagaikan sunami, kampanye hitam dengan mengedepankan cacian dan makian demi memperlihatkan bobroknya lawan politik tidak pernah bisa dikendalikan baik oleh pemerintah ataupun kepolisian.

Hal tersebut terjadi akibat dari kurangnya edukasi bagi masyarakat Indonesia khususnya pada hal ini adalah edukasi etika dalam bersosial media. Panutan kita sebagai negara yang memiliki kebebasan dalam berkomunikasi dan menyampaikan suatu informasi hanya dibatasi oleh hukum-hukum tertulis, sedangkan edukasi komunikasi seperti salah satu kasus diatas adalah edukasi moral yang perlu dibina dari kalangan keluarga dan lingkungan masyarakat.

Lalu bagaimana agar dampak negatif tersebut bisa kita hindari atau bahkan bisa kita hilangkan? Terkadang kita selalu menghukum pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan norma yang kita anut, namun hal itu tidak semata-mata kesalahan dari seorang individu. Memang manusia hakikatnya memiliki kebebasan untuk berfikir seperti yang disampaikan oleh Jujun S Suriasumantri

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang berpikir, merasa, berkehendak, bersikap dan bertindak. Kegiatan berpikir merupakan karakteristik dasar manusia yang membedakannya dengan makhluk lain. Al-Qur'an banyak menyerukan kepada manusia untuk berpikir.

Sebagai khalifah Allah di Bumi, manusia diberi kebebasan menggunakan akal pikirnya untuk memakmurkan

kehidupan. Berpikir merupakan suatu kegiatan untuk menemukan pengetahuan yang benar. Apa yang disebut benar bagi setiap orang adalah tidak sama. Oleh karenanya kegiatan berpikir untuk menghasilkan pengetahuan yang benar itu pun juga berbeda-beda. Dengan kata lain, setiap jalan pikiran mempunyai apa yang disebut sebagai kriteria kebenaran, dan kriteria ini merupakan landasan bagi proses penemuan kebenaran tersebut. Karena perbedaan kriteria, kebenaran ada yang bersifat subyektif dan ada yang bersifat obyektif. Keduanya dapat diperoleh melalui proses berpikir. Oleh karena itu sebuah kebenaran yang dicapai melalui berpikir sangat ditentukan oleh subyektifitas atau obyektifitas dalam berpikir.

Dari pembahasan tersebut untuk merubah suatu ucapan yang tertuang karena pemikiran dari beberapa individu, bukan dengan menghukum individu tersebut namun dengan membuat sebuah keadaan (proses pembelajaran) tentang bagaimana beretika dalam menyampaikan sebuah pendapat. Namun tentu hal itu perlu diperjuangkan dengan sangat gigih. Seperti bisa kita lihat saat ini masyarakat Indonesia memang sudah terlalu jauh terbawa arus edukasi yang kurang baik, sehingga politik yang terbangun juga menjadi politik yang kurang baik.

Komunikasi yang bagaikan senjata paling mutakhir saat ini dalam mendapatkan posisi yang baik didalam dunia politik dimanfaatkan oleh segelintir penguasa ekonomi untuk memutar balikan fakta-fakta yang ada. Dalam pandangan Penulis, jeruk yang berwarna kuning bisa saja dirubah menjadi warna merah melalui proses pemberian pesan yang secara terus menerus kepada masyarakat.

Keadaan tersebut sangat membahayakan iklim politik dan bermasyarakat kita. jika terus dibiarkan dan tanpa adanya keinginan untuk berubah menjadi lebih baik maka bisa dipastikan negara kita diujung tanduk dalam hal moral dan juga segala aspek yang bersangkutan. Inilah mengapa perlunya pengawasan dan

bimbingan yang mendalam terhadap ilmu yang akan diterapkan kepada suatu masyarakat. Ilmu sendiri kerap menjadi pembicaraan yang tidak ada habisnya.

Lalu apa itu ilmu? Kata ilmu merupakan terjemahan dari kata dalam bahasa Inggris : *Science*. Kata *science* ini berasal dari kata Latin *Scientia* yang berarti pengetahuan. Kata *scientia* ini berasal dari bentuk kata kerja *scire* yang artinya mempelajari, mengetahui. Pada mulanya cakupan ilmu (*science*) secara etimologis menunjuk pada pengetahuan semata-mata, pengetahuan apa saja. Pertumbuhan selanjutnya pengertian ilmu (*science*) ini mengalami perluasan arti, sehingga menunjuk pada segenap pengetahuan sistematis (*systematic knowledge*). Pemakaian yang luas dari kata ilmu (*science*) ini diteruskan dalam bahasa Jerman dengan istilah *wissenschaft* yang berlaku terhadap kumpulan pengetahuan apapun yang teratur, termasuk di dalamnya *naturwissenschaften* yang mencakup ilmu ilmu kealaman maupun *geisteswissenschaften* yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai the *humanities* (pengetahuan kemanusiaan), sementara dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai ilmu-ilmu budaya yang pada umumnya mencakup pengetahuan-pengetahuan tentang bahasa dan sastra, estetika, sejarah, filsafat dan agama.

Ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan melalui metode ilmiah. Tidak semua pengetahuan dapat disebut ilmu sebab ilmu merupakan pengetahuan yang cara mendapatkannya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu pengetahuan dapat disebut ilmu tercantum dalam metode ilmiah. Metode merupakan prosedur atau cara mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Metodologi merupakan suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan dalam metode tersebut.

4. KESIMPULAN

Sepenggal informasi tentang ilmu diatas meberikan gambaran kepada kita bahwa dalam mencari, mengembangkan dan menerapkan ilmu harus dengan proses yang baik dan juga diiringi oleh keimanan kita kepada Tuhan YME. Saat kita akan mengamalkan ilmu, kepercayaan kita terhadap tuhan menjadi benteng kita agar tidak keluar dari kegunaan ilmu untuk kebaikan masyarakat luas. Hal itu menghindarkan kita menggunakan ilmu sebagai pemuas nafsu pribadi saja.

Sebagai warga negara Indonesia, bagaimanapun perkembangan politik yang ada dan apapun yang mempengaruhinya sesuai dengan zamannya kita harus kembali kepada dasar negara kita yaitu Pancasila. Dalam pertumbuhan dan perkembangan kebangsaan Indonesia, dinamika rumusan kepentingan hidup-bersama di wilayah nusantara diuji dan didewasakan sejak dimulainya sejarah kebangsaan Indonesia. Pendewasaan kebangsaan Indonesia memuncak ketika mulai dijajah dan dihadapkan pada perbedaan kepentingan ideologi (awal Abad XIX) antara Liberalisme, Nasionalisme, Islamisme, Sosialisme-Indonesia, dan Komunisme, yang diakhiri secara yuridis ketatanegaraan tanggal 18 Agustus 1945 bertepatan dengan ditetapkannya Pancasila oleh PPKI sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kelahirannya ditempa dalam proses perjuangan kebangsaan Indonesia sehingga perlu dipertahankan dan diaktualisasikan. Di samping itu, Pancasila perlu memayungi proses reformasi untuk diarahkan pada *'reinventing and rebuilding'* Indonesia dengan berpegangan pada perundang-undangan yang juga berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara. Melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai payung hukum,

Pancasila perlu diaktualisasikan agar dalam praktik berdemokrasinya tidak kehilangan arah dan dapat meredam konflik yang tidak produktif.

Sila-sila yang terkandung dalam Pancasila adalah ideologi awal kita terhadap bernegara dan merupakan representatif pemikiran seluruh rakyat Indonesia. Seperti yang tertuang dalam sila pertama yaitu "Ketuhanan Yang Maha Esa" yang menggambarkan bagaimana kita sebagai manusia yang bernegara mengawali ideologi kita terhadap agama yang merupakan wahyu yang diturunkan langsung oleh Tuhan YME.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan sila pertama dan utama yang menerangi keempat sila lainnya. Paham Ketuhanan itu diwujudkan dalam paham kemanusiaan yang adil dan beradab. Dorongan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu menentukan kualitas dan derajat kemanusiaan seseorang di antara sesama manusia, sehingga perikehidupan bermasyarakat dan bernegara dapat tumbuh sehat dalam struktur kehidupan yang adil, dan dengan demikian kualitas peradaban bangsa dapat berkembang secara terhormat di antara bangsa-bangsa (Asshiddiqie, Jimly, 2005). Semangat Ketuhanan Yang Maha Esa itu hendaklah pula meyakinkan segenap bangsa Indonesia untuk bersatu padu di bawah tali Tuhan Yang Maha Esa. Perbedaan-perbedaan diantara sesama warga Negara Indonesia tidak perlu diseragamkan, melainkan dihayati sebagai kekayaan bersama yang wajib disyukuri dan dipersatukan dalam wadah Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dalam wadah negara, rakyatnya adalah warga negara. Oleh karena itu, dalam kerangka kewarganegaraan, tidak perlu dipersoalkan mengenai etnisitas, anutan agama, warna kulit, dan bahkan status sosial seseorang. Yang penting dilihat adalah status kewarganegaraan seseorang dalam wadah negara. Semua orang memiliki kedudukan yang sama sebagai warga negara. Setiap warga negara adalah

rakyat, dan rakyat itulah yang berdaulat dalam Negara Indonesia, di mana kedaulatannya diwujudkan melalui mekanisme atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia (Asshiddiqie, Jimly , 2005). Andai saja kita seluruh rakyat Indonesia dapat terus menjunjung tinggi ideologi awal kita ini maka segala kemerawutan yang terjadi pada negara kita ini bisa terselesaikan dan kemudian terciptalah bangsa yang diimpikan oleh pendiri bangsa kita. Andai saja kita seluruh rakyat Indonesia dapat terus menjunjung tinggi ideologi awal kita ini maka segala kemerawutan yang terjadi pada negara kita ini bisa terselesaikan dan kemudian terciptalah bangsa yang diimpikan oleh pendiri bangsa.

5. REFERENSI

- Adam, Asvi Warman.2006. *Habibie, Prabowo dan Wiranto Bersaksi*. Jakarta: Media Kita
- Liliweri, Alo. 2004. *Wacana Komunikasi Organisasi*. Bandung: Mandar Maju.
- Mulyana, deddy. 2004. *Ilmu Komunikasi, Suatu Pengantar*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Suriasumantri Jujun S. 2009. *Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Popule*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Soewardi, Herman. 1997. *Roda Berputar Dunia Bergulir. Kognisi Baru Tentang TimbulTenggelamnya Sinilisasi*. Bandung: Bakti Mandiri

SUMBER LAINNYA

- <http://www.kpu-kepahiangkab.go.id/info-pemilukada/penetapan-pembatasan-biaya-kampanye-pasangan-calon-peserta-pemilihan-bupati-dan-wakil-bupati-kepahiang-tahun-2015#!prettyPhoto/0/> Diakses tgl 16 Desember 2018 pukul: 20.00
- <http://sida.lanri.info/sida/attachment/Pilar%20Kehidupan%20Berbangsa%20dan%20Bernegara.pdf>. Diakses tgl 16 Desember 2018 pukul: 20.00